

Membangun Integritas Sejak Dini: Pendidikan Antikorupsi untuk Guru SMA melalui Integrasi Ekonomi, Karakter, dan Teknologi

Khresna Bayu Sangka^{1*}, Agung Nur Probahudono², Nurmadi Harsa Sumarta³, Anis Widjajanto⁴, Estetika Mutiaranisa Kurniawati⁵, Nur Chayati⁶, Ramadhan Defitri Pratama⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO), Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

E-mail: b.sangka@staff.uns.ac.id

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1980>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 09 July 2025

Revised: 18 July 2025

Accepted: 26 July 2025

Kata Kunci

Pendidikan antikorupsi, Guru, Integritas, Karakter, Artificial Intelligence

Keywords

Anti-corruption education, Teachers, Integrity, Character, Artificial Intelligence



ABSTRACT

Pendidikan anti korupsi merupakan pendekatan strategis dalam membangun karakter dan integritas generasi muda sejak jenjang sekolah menengah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru SMA mengenai konsep dan implementasi pendidikan antikorupsi melalui kegiatan sosialisasi interaktif. Metode yang digunakan adalah desain *one-group pretest-posttest* dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Peserta kegiatan adalah guru SMA di wilayah Surakarta yang mengikuti pelatihan yang melibatkan ceramah interaktif, studi kasus, dan pemanfaatan teknologi seperti chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) sebagai media evaluasi. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar guru berada pada kategori belum memahami atau kurang memahami. Setelah kegiatan, terjadi peningkatan signifikan: kategori “sangat memahami” naik dari 10% menjadi 53%, sementara kategori “tidak memahami” turun dari 33% menjadi 7%. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang disertai teknologi dan diskusi etis dapat mendorong pemahaman yang lebih baik. Kegiatan ini memperkuat urgensi penguatan kapasitas guru sebagai agen pembentukan nilai, sejalan dengan tujuan Indonesia Emas 2045 dan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16 tentang institusi yang adil dan berintegritas.

Anti-corruption education is a strategic approach to building the character and integrity of youth, starting at the high school level. This community service program aimed to improve the understanding of high school teachers regarding the concepts and implementation of anti-corruption education through an interactive socialization program. The method employed was a one-group pretest-posttest design using a descriptive quantitative approach. The participants were high school teachers from Surakarta who attended a training session involving interactive lectures, case studies, and the use of artificial intelligence-based chatbots as evaluation tools. The pre-test results showed that most teachers were in the “not understanding” or “less understanding” categories. After the session, there was a significant improvement: the “very understanding” category increased from 10% to 53%, while the “not understanding” category decreased from 33% to 7%. These findings suggest that educational approaches supported by technology and ethical discussions can foster stronger conceptual and practical understanding. This program supports the urgency of strengthening teacher capacity as value facilitators, in alignment with the Indonesia Emas 2045 vision and SDG 16 on just and accountable institutions



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Khresna Bayu Sangka, et al (2025). Membangun Integritas Sejak Dini: Pendidikan Antikorupsi untuk Guru SMA melalui Integrasi Ekonomi, Karakter, dan Teknologi 4(1), 2440-2444

<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1980>

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena sistemik yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan integritas institusi, memperburuk kualitas pelayanan publik, dan menciptakan ketimpangan sosial. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dengan tercatat 791 kasus korupsi yang melibatkan 1.695 tersangka, meningkat dari 271 kasus dan 580 tersangka pada tahun 2019 (ICW, 2024). Korupsi di Indonesia tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Salah satu contoh terbaru adalah kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan, di mana tiga tersangka baru telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2024, dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 300 miliar (KPK, 2024). Peningkatan Tindakan korupsi ini mencerminkan adanya ketidakefektifan strategi pemberantasan dan kurangnya efek jera dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Hal ini mencerminkan urgensi pendekatan yang lebih menyeluruh dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk melalui jalur pendidikan.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral generasi muda. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya diajarkan sebagai wacana hukum, tetapi harus diinternalisasi sebagai nilai yang membentuk pola pikir dan perilaku peserta didik. *Fraud triangle* yang dikemukakan oleh Donald Cressey (1953) mengungkap bahwa tindakan korupsi biasanya lahir dari interaksi tiga elemen utama: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan ketangguhan moral sejak dini melalui pendidikan menjadi langkah preventif yang sangat penting untuk mengikis akar budaya korupsi.

Di Indonesia, upaya ini telah memperoleh dukungan normatif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2018 telah mendorong integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang menekankan nilai integritas seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab (Kemendikdasmen, 2023). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 yang mewajibkan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah menengah (Pemprov Jateng, 2019).

Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah menghadapi tantangan implementasi. Kurangnya media pembelajaran yang menarik dan kontekstual, belum adanya pelatihan guru sebagai agen perubahan nilai integritas, serta minimnya ruang partisipatif seperti forum pelajar antikorupsi menjadi hambatan yang perlu diatasi. Perlu pendekatan inovatif yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, misalnya melalui integrasi teknologi digital dan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Masa remaja, khususnya di tingkat sekolah menengah atas, merupakan fase krusial dalam pembentukan *moral compass* siswa. Pada tahap ini, peserta didik mulai membentuk proyeksi jangka panjang atas nilai dan pilihan hidup mereka. Maka dari itu, menanamkan kesadaran antikorupsi pada jenjang ini adalah investasi sosial jangka panjang yang mendukung terwujudnya *generasi emas Indonesia 2045* yang berintegritas. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan global dalam kerangka *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) yang menyerukan penguatan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat.

Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah menengah merupakan langkah strategis dan fundamental dalam memperkuat implementasi nilai-nilai integritas secara sistematis. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa mengenai bahaya korupsi, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan karakter generasi muda yang berdaya tangkal tinggi terhadap praktik-praktik penyimpangan, sejalan dengan visi pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain *one-group pretest-posttest* untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi pendidikan anti korupsi terhadap pemahaman dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas di sekolah.

Desain ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mengenai perubahan pengetahuan dan sikap peserta sebelum dan sesudah diberikan intervensi berupa materi sosialisasi (Creswell, 2014).

Desain *one-group pretest-posttest* termasuk dalam *quasi-experimental design*, di mana kelompok yang sama diukur dua kali, sebelum dan sesudah perlakuan diberikan, untuk menilai dampak intervensi secara langsung (Sugiyono, 2020). Pada tahap awal, peserta diberikan pre-test berupa kuesioner terstruktur untuk mengukur tingkat pemahaman awal mengenai pendidikan anti korupsi. Selanjutnya, dilakukan kegiatan inti berupa pemberian materi oleh 3 narasumber melalui metode ceramah interaktif, studi kasus, serta pemanfaatan media digital.

Sasaran dari kegiatan ini adalah guru dari seluruh SMA Negeri di wilayah Kota Surakarta yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Penentuan sampel dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam mata pelajaran yang relevan dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Setelah kegiatan selesai, dilakukan post-test dengan instrumen yang serupa guna mengidentifikasi peningkatan pemahaman dan kesiapan guru dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam proses pembelajaran. Data hasil pretest dan posttest kemudian direduksi dan dianalisis secara deskriptif komparatif untuk melihat perbedaan kecenderungan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan untuk para guru sekolah menengah atas di wilayah Surakarta bertujuan memperkuat pemahaman dan kesiapan pendidik dalam mengintegrasikan nilai-nilai integritas dalam pembelajaran. Kegiatan ini dikembangkan dengan pendekatan kolaboratif antara teori pendidikan karakter, pemanfaatan teknologi digital, dan diskusi etis dalam konteks pembelajaran.

Dinamika Materi dan Pembelajaran Interaktif

Kegiatan dimulai dengan refleksi kritis terhadap kondisi etika di lingkungan sekolah, khususnya terkait perilaku tidak jujur yang masih sering dianggap sepele seperti kecurangan saat mengerjakan laporan keuangan di sekolah, kecurangan saat ujian atau manipulasi tugas. Praktik-praktik semacam ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berkembang dari kebiasaan permisif terhadap pelanggaran kecil yang dibiarkan.

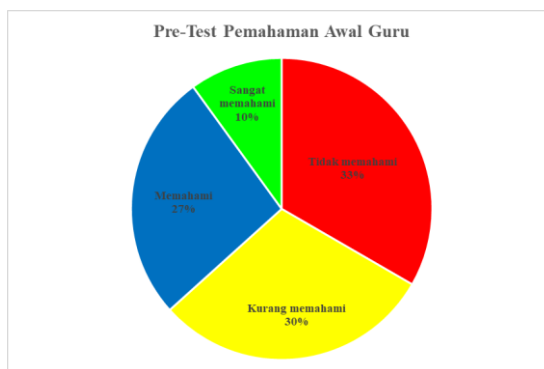
Dalam pemaparan materi inti, peserta dibekali dengan pendekatan teoritik yang mengacu pada model *fraud triangle*, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, yang menjadi akar dari perilaku curang. Ketiga elemen ini sering kali hadir dalam lingkungan pendidikan, terutama saat tuntutan akademik tinggi tidak diimbangi dengan penguatan nilai moral dan integritas.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital diposisikan sebagai peluang sekaligus tantangan. Teknologi dapat mendorong perilaku manipulatif jika digunakan tanpa kontrol, namun juga dapat menjadi instrumen untuk membangun sistem pembelajaran yang transparan dan adil. Salah satu pendekatan yang diperkenalkan dalam kegiatan ini adalah pemanfaatan *Artificial Intelligence atau chatbot AI* sebagai alat bantu evaluasi. Teknologi ini dapat menekan ruang intervensi subjektif dan mengurangi praktik manipulatif, serta memperkuat budaya penilaian berbasis kejujuran.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya penguatan nilai etis melalui pembelajaran kontekstual. Pendekatan berbasis studi kasus, diskusi tentang dilema moral, dan refleksi terhadap praktik ekonomi sehari-hari disarankan sebagai metode pengajaran yang efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan karakter yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam membangun kesadaran etis, bukan hanya sebagai penerima informasi.

Hasil Evaluasi Pre-Test dan Post-Test

Evaluasi efektivitas kegiatan dilakukan melalui pengukuran pre-test dan post-test terhadap pemahaman peserta. Pada tahap awal, mayoritas guru menunjukkan pemahaman yang masih terbatas. Sebanyak 33% responden menyatakan tidak memahami pendidikan antikorupsi, sementara 30% menyatakan kurang memahami. Hanya 27% yang menyatakan memahami, dan 10% menyatakan sangat memahami.



Gambar 1 Hasil Pre-Test Pemahaman Awal Guru

Setelah kegiatan selesai, terjadi pergeseran signifikan. Jumlah responden yang menyatakan sangat memahami meningkat menjadi 53%, sementara yang menyatakan tidak memahami menurun drastis menjadi 7%. Responden yang menyatakan memahami tetap di angka 27%, dan kategori kurang memahami menurun menjadi 13%.



Gambar 2 Hasil Post-Test Pemahaman Akhir Guru

Perubahan ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan, dikombinasikan dengan pendekatan interaktif, mampu meningkatkan pengetahuan konseptual sekaligus kesadaran praktis tentang pentingnya pendidikan antikorupsi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pendidik dapat lebih siap untuk menjadi fasilitator nilai dalam proses pembelajaran setelah memperoleh pemahaman yang utuh dan aplikatif.

Implikasi Edukatif

Transformasi pemahaman yang terjadi pada peserta memberikan gambaran bahwa pendidikan antikorupsi perlu dilakukan secara sistemik dan kontekstual. Pendidik memiliki peran strategis sebagai penggerak nilai integritas di sekolah. Namun, untuk menjalankan peran tersebut secara optimal, diperlukan dukungan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, dan inovasi media pembelajaran. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai antikorupsi tidak hanya bertujuan mengurangi penyimpangan perilaku di lingkungan sekolah, tetapi juga membentuk pola pikir jangka panjang yang menolak praktik korupsi dalam kehidupan sosial dan profesional. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari investasi sosial yang sangat penting dalam mencetak generasi berdaya tangkal tinggi terhadap praktik korupsi.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi bagi guru-guru sekolah menengah atas di wilayah Surakarta memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan pendidik dalam menginternalisasikan nilai-nilai integritas ke dalam pembelajaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta, yang mencerminkan keberhasilan pendekatan edukatif berbasis teori, studi kasus, dan pemanfaatan teknologi dalam proses pelatihan.

Penerapan materi berbasis *fraud triangle*, diskusi etis, serta inovasi melalui media digital seperti chatbot, terbukti mendorong refleksi kritis peserta terhadap pentingnya membangun budaya kejujuran sejak dini. Guru yang sebelumnya belum sepenuhnya memahami urgensi pendidikan antikorupsi menjadi lebih menyadari peran strategis mereka sebagai agen pembentuk karakter siswa.

Kegiatan ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi bukan sekadar materi tambahan dalam kurikulum, melainkan bagian dari gerakan transformatif untuk menciptakan budaya sekolah yang bersih, adil, dan bermartabat. Upaya semacam ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang dalam rangka mewujudkan *Indonesia Emas 2045*, serta mendukung capaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-16 terkait penguatan institusi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pelibatan guru dalam program penguatan kapasitas seperti ini harus terus dilanjutkan dan dikembangkan secara berkelanjutan agar pendidikan antikorupsi dapat diimplementasikan tidak hanya sebagai wacana, tetapi sebagai praktik nyata dalam proses belajar mengajar sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Terimakasih kepada LPPM UNS dengan kontrak pengabdian masyarakat 370/UN27.22/PT.01.03/2025.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approache*. SAGE Publications.
- Indonesia Corruption Watch. (2024, May 19). *Angka korupsi meningkat pada 5 tahun terakhir, ICW ungkap ada dua faktor penyebabnya*. Indonesia Corruption Watch. <https://www.suara.com/news/2024/05/19/184045/angka-korupsi-meningkat-pada-5-tahun-terakhir-icw-ungkap-ada-dua-faktor-penyebabnya>
- Kemendikdasmen. (2023, June 21). *Kemendikdasmen Berkomitmen Meningkatkan Pendidikan Antri Korupsi di Sekolah*. Kemendikdasmen. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/06/dukung-kpk-berantas-korupsi-kemendikbudristek-berpartisipasi-dalam-paku-integritas>
- KPK. (2024, September 26). *KPK Tahan 4 Tersangka Pengembangan Perkara Korupsi Pengadaan Proyek Bandung Smart City*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tahan-4-tersangka-pengembangan-perkara-korupsi-pengadaan-proyek-bandung-smart-city>
- Pemprov Jateng. (2019, April 8). *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. <https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/pergub-nomor10-tahun-20197>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.